



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026



Jalan. Prof. Moh. Yamin, S.H., Nomor. 52. Kota Palu
Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan,
Palu, Sulawesi Tengah, 94231.

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Berkeadilan, Berprestasi,
Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**

0451 - 483 385
0811 4444 064
ptun.palu@gmail.com
www.ptun-palu.go.id

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROSIDAH, S.H., M.H.
Nip : 19771117 200112 2 002
Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : Dr. H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H.
Nip : 19590215 198612 1 001
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 5 Januari 2026

Pihak Pertama

ROSIDAH, S.H., M.H.

Pihak Kedua

DR. H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	92%
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak.	93%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	92%
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	97%
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan Tata Usaha Negara.	94%
		1.6 Persentase perkara Tata Usaha Negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court.	93%
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	87%
3.	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	78%
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01.	92%
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05.	92%
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01.	88%
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05.	88%
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	3.5

DUKUNGAN ANGGARAN PROGRAM / KEGIATAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Peningkatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp 7.324.021.000,00-
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp 74.000.000,00-
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp 69.732.000,00-

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu



ROSIDAH, S.H., M.H.

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Makassar



Dr. H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H.